

ANALISIS PENGARUH BELANJA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DI PAPUA BARAT

Dedy Riantoro¹, Albertus Girik Allo², Yulius Heri Saptomo³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua

² korespondensi: ag.allo@unipa.ac.id

ABSTRACT

Local Government Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD) of West Papua Province in the last decade has continued to increase. However, the percentage of poor people in West Papua Province is still in the 2nd lowest rank in the same period. This study aims to examine the effect of spending on education and health on the quality of human resources in West Papua. The data used is panel data from 12 districts and 1 city in West Papua Province from 2014-2019. Multiple regression model with fixed effect at district/city level was used to estimate data. The results of the analysis show that education and health sector spending has a positive impact on improving the quality of human resources as measured by human development index (HDI). Variable GRDP per capita shows a positive contribution to the increase in HDI. PAD per capita did not significantly contribute to the increase in HDI. Meanwhile, the variable percentage of poor people (P0) shows a negative and significant contribution to HDI.

Keywords: Human Development Index, Education Expenditure, Health Expenditure

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat dalam satu dekade terakhir terus mengalami peningkatan. Namun, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat masih berada pada peringkat ke-2 terbawah dalam periode yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh belanja sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kualitas sumberdaya manusia di Papua Barat. Data yang digunakan adalah data panel dari 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2014-2019. Model regresi berganda dengan fixed effect level kabupaten/kota digunakan untuk mengestimasi data. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang positif bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diukur dengan IPM. Variabel PDRB per kapita menunjukkan kontribusi yang positif bagi peningkatan IPM. PAD per kapita tidak memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan IPM. Sedangkan variabel persentase penduduk miskin (P0) menunjukkan kontribusi yang negatif dan signifikan bagi IPM.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Sektor Pendidikan, Belanja sektor Kesehatan

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara maka dibutuhkan pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses melaksanakan perubahan pada indikator sosial dan ekonomi masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan berkesinambungan (1,2). Pertumbuhan ekonomi daerah secara umum

menjadi indikator keberhasilan pembangunan di daerah. Hal ini berhubungan dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang terus meningkat. Peningkatan ini diharapkan bisa dapat memberikan *trickle-down effect*. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi sudah sewajarnya menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat nasional maupun

daerah. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM menunjukkan seberapa besar penduduk/masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatannya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan naiknya produktivitas perekonomian sehingga tingkat pendapatan juga mengalami kenaikan (3). Kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan kenaikan PDRB.

Besarnya PAD dapat dijadikan tolok ukur seberapa besar kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat dan akan meningkatkan IPM (4).

Permasalahan utama dalam meningkatkan IPM adalah kemiskinan, karena kemiskinan berhubungan dengan kondisi fundamental yang menjadi syarat berlangsungnya pembangunan suatu negara yang berkelanjutan. Kemiskinan

diduga dapat menjadi disparitas dalam meningkatkan IPM. Hal ini karena kemiskinan dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang layak, dan tingkat kesehatan yang layak dapat menyebabkan tidak ada peningkatan pada sumber daya manusia dan dapat menyebabkan pengangguran meningkat (5).

Pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat perlu mendapat perhatian khusus sebab masih rendahnya capaian nilai IPM, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau masalah kemiskinan. Rendahnya nilai IPM yang disebabkan oleh masalah kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati pendidikan, kesehatan serta standar hidup yang kurang layak. Untuk meningkatkan kualitas nilai IPM maka dimulai dari perbaikan dan perhatian pada masalah pendidikan dan kesehatan (sumberdaya manusia), serta diikuti dengan sektor-sektor lain. SDM perlu perhatian khusus karena merupakan modal bagi suatu daerah agar dapat bersaing dengan daerah lainnya. Dengan demikian pembangunan di daerah tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

Tanah Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya. Dua provinsi yang ada di Tanah Papua yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dua provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di kedua

provinsi ini adalah 27,38 dan 21,82, secara berturut-turut (6). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh indikator IPM, dimana kedua provinsi ini memiliki nilai IPM yang rendah. Pada tahun 2021, nilai IPM Provinsi Papua sebesar 60,62 dan Provinsi Papua Barat sebesar 65,26 (7).

Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Total belanja seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir (2011-2020). Pada periode tersebut belanja seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tumbuh sebesar 15,67 persen per tahun (8). Pada tahun 2020, alokasi belanja lebih banyak digunakan untuk belanja tidak langsung (52,40 persen) dibandingkan dengan belanja langsung (47,60 persen). Jika dilihat lebih jauh pada komposisi belanja tidak langsung maka belanja pegawai tidak langsung memiliki proporsi yang besar yaitu 28,79 persen atau 15,08 persen dari total belanja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Papua Barat. Kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Papua Barat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artikel ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi.

METODE

Data

Penelitian ini menggunakan data panel. Intitas dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat yang berjumlah 13, yaitu: Kabupaten Fakfak, Kabupaten, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Waktu periode penelitian ini adalah 2014-2019. Pemilihan periode penelitian disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak secara resmi terbentuk pada tahun 2012 melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2012 dan UU No. 24 Tahun 2012, secara berturut-turut. Kedua, Pandemi Covid-19 terjadi diakhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 merupakan masa dimana ada pemulihan ekonomi nasional dan *refocusing* anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penanganan Covid-19. Sumber data yang digunakan berasal dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat.

Model Estimasi

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan

spesifikasi umum dari persamaan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 Exp_{it} + \sum_{i=1}^j \gamma_i X_{it} + e_{it} \dots (1)$$

Dimana, i adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat, dan t adalah periode pengamatan. Variabel IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan salah satu ukuran pembangunan ekonomi suatu daerah. Variabel Exp adalah belanja pemerintah untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Sedangkan variabel X adalah variabel kontrol yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita, dan persentase penduduk miskin (P_0). Hasil estimasi koefisien β_1 akan menjadi bias karena adanya *unobserved heterogeneity* yang tertangkap di *error term* (e) (9) yang mempengaruhi IPM namun tidak dimasukkan dalam penelitian ini yaitu arah kebijakan dari setiap Bupati dan Walikota dalam meningkatkan pembangunan ekonomi wilayahnya terutama peningkatan nilai IPM . Untuk mengatasi masalah tersebut maka model diatas kemudian dimodifikasi sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 Exp_{it} + \sum_{i=1}^j \gamma_i X_{it} + \delta a_i + e_{it} \dots (2)$$

Notasi a_i menunjukkan bahwa *fixed effect* level kabupaten/kota. *Fixed effect* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah *unobserved heterogeneity* menyebabkan nilai estimasi menjadi bias. Model di atas kemudian dikembangkan untuk menguji hipotesis yang dibangun.

Hipotesis Ho:

Variabel belanja urusan kesehatan mampu meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi (yang diukur dengan IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Hipotesis Ha:

Variabel belanja urusan pendidikan mampu meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi (yang diukur dengan IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* kepada sektor-sektor lainnya dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat dalam periode 2014 – 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kota Sorong (8,24%) dan terendah di Kabupaten Sorong (2,90%). Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut masih ditopang oleh sektor primer terutama Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Sektor Pertambangan dan Penggalian kecuali Kabupaten Teluk Bintuni yang didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Migas.

Tabel 1: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014 – 2019 (10)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Fakfak	7,19	7,29	5,24	7,13	6,59	5,29	6,46
Kaimana	5,45	4,97	3,17	5,76	5,58	3,71	4,77
Teluk Wondama	5,20	3,89	5,42	5,24	4,01	4,18	4,66
Teluk Bintuni	2,43	2,85	2,71	1,32	5,25	3,41	3,00
Manokwari	8,60	7,36	7,25	7,04	5,16	5,30	6,79
Sorong Selatan	7,17	6,40	6,04	7,47	6,15	5,69	6,49
Sorong	3,08	2,35	0,89	3,36	5,66	2,05	2,90
Raja Ampat	6,13	1,97	2,38	-0,01	4,58	3,92	3,16
Tambrauw	6,76	5,83	4,95	6,33	5,46	6,47	5,97
Maybrat	6,33	5,51	6,40	6,56	6,10	5,44	6,06
Manokwari Selatan	5,80	4,59	4,82	4,44	4,48	6,78	5,15
Pegunungan Arfak	9,10	6,67	3,15	3,36	10,62	4,96	6,31
Kota Sorong	12,10	10,27	9,05	8,26	6,73	3,00	8,24

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk melihat pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah kualitas pembangunan manusia. Salah satu indikator yang digunakan adalah IPM. Data tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan namun dalam taraf yang lambat. Pada tahun 2019, IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa terdapat lima kabupaten

yang berada dalam kategori rendah, enam berada dalam kategori sedang dan 1 kabupaten serta 1 kota yang berada dalam kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014, maka kondisi ini tidak jauh berbeda. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat perlu menjadi perhatian khusus dalam agenda pembangunan.

Tabel 2: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014 – 2019 (11)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kategori 2019
Fakfak	64,73	64,92	65,55	66,09	66,99	67,87	Sedang
Kaimana	61,07	61,33	62,15	62,74	63,67	64,59	Sedang
Teluk Wondama	56,27	56,64	57,16	58,10	58,86	59,82	Rendah
Teluk Bintuni	60,40	61,09	61,81	62,39	63,13	64,00	Sedang
Manokwari	69,35	69,91	70,34	70,67	71,17	71,67	Tinggi
Sorong Selatan	58,24	58,60	59,20	60,19	61,01	61,93	Sedang
Sorong	61,23	61,86	62,42	63,42	64,32	65,29	Sedang
Raja Ampat	60,86	61,23	61,95	62,35	62,84	63,66	Sedang

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kategori 2019
Tambrauw	49,40	49,77	50,35	51,01	51,95	52,90	Rendah
Maybrat	55,36	55,78	56,35	57,23	58,16	59,15	Rendah
Manokwari Selatan	55,32	56,59	57,12	58,08	58,84	59,72	Rendah
Pegunungan Arfak	53,69	53,73	53,89	54,39	55,31	56,15	Rendah
Kota Sorong	75,78	75,91	76,33	76,73	77,35	77,98	Tinggi

Nilai Gini Ratio adalah suatu nilai yang merepresentasikan distribusi pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah. Nilai Gini Ratio memiliki rentang antara 0 hingga 1, jika mendekati satu maka tingkat ketimpangan

pendapatan antar penduduk semakin tinggi dan sebaliknya jika mendekati nilai 0. Nilai Gini Ratio tertinggi berada di Kabupaten Teluk Wondama dan terendah di Kabupaten Tambrauw.

Tabel 3: Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014 – 2019 (12)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Fakfak	0,36	0,34	0,40	0,37	0,40	0,39	0,38
Kaimana	0,40	0,31	0,34	0,43	0,44	0,40	0,39
Teluk Wondama	0,43	0,37	0,38	0,44	0,41	0,41	0,41
Teluk Bintuni	0,32	0,39	0,34	0,34	0,39	0,36	0,36
Manokwari	0,42	0,47	0,31	0,37	0,40	0,38	0,39
Sorong Selatan	0,39	0,35	0,41	0,35	0,42	0,42	0,39
Sorong	0,33	0,39	0,33	0,40	0,37	0,39	0,37
Raja Ampat	0,36	0,38	0,33	0,40	0,39	0,39	0,38
Tambrauw	0,28	0,26	0,25	0,28	0,34	0,29	0,28
Maybrat	0,25	0,28	0,30	0,37	0,41	0,37	0,33
Manokwari Selatan	-	-	0,36	0,41	0,39	0,40	0,39
Pegunungan Arfak	-	-	0,27	0,27	0,39	0,29	0,31
Kota Sorong	0,40	0,32	0,30	0,33	0,33	0,32	0,33

Persentasi Penduduk Miskin (P0) adalah salah satu gambaran dari keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu wilayah. Jika semakin sedikit rendah nilai P0 maka semakin banyak masyarakat di wilayah tersebut yang kehidupannya diatas garis kemiskinan dan sebaliknya. Data P0 tahun 2014-2019 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa terdapat lima kabupaten

yang memiliki nilai P0 di atas 30 persen dan hanya 2 kabupatn dan 1 kota yang memiliki nilai P0 dibawah 20 persen. Hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah dalam pemberian bantuan sosial terutama pada saat adanya guncangan pendapatan akibat Pandemi Covid-19. Bantuan sosial yang tepat sasaran akan mempertahankan rumah tangga yang rentan miskin untuk tidak jatuh dalam kemiskinan dan rumah tangga yang

miskin tidak semakin berada dalam keterpurukan kemiskinan (*chronic poverty*).

Tabel 4: Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014 – 2019 (13)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fakfak	29,18	27,51	26,66	25,96	24,31	23,25
Kaimana	17,65	17,79	17,44	17,22	16,65	16,11
Teluk Wondama	38,81	37,44	36,37	36,37	33,32	32,42
Teluk Bintuni	38,92	36,66	34,72	34,32	31,30	30,57
Manokwari	27,63	25,28	24,93	24,32	22,21	21,06
Sorong Selatan	19,73	20,38	19,92	19,66	19,14	18,41
Sorong	34,30	33,35	33,25	32,86	30,19	28,61
Raja Ampat	20,73	20,94	20,50	20,00	17,80	17,16
Tambrauw	38,35	38,11	36,67	35,99	34,59	33,66
Maybrat	35,20	35,31	34,65	34,87	32,89	32,20
Manokwari Selatan	-	34,33	34,15	34,02	30,87	29,94
Pegunungan Arfak	-	38,53	39,46	39,23	35,72	34,83
Kota Sorong	18,37	17,56	17,85	17,78	15,85	15,45

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduknya perlu untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tenaga kerja yang semakin banyak terserap pada dunia usaha dunia industri akan menciptakan iklim ekonomi yang semakin baik di suatu wilayah. Namun, jika tingkat pengangguran yang semakin tinggi di suatu wilayah maka akan muncul semakin banyak masalah sosial lainnya. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2014-2019

menunjukkan bahwa TPT tertinggi berada di Kabupaten Fakfak dan terendah di Kabupaten Maybrat. Secara umum, TPT di Provinsi Papua Barat dapat dikategorikan rendah. Hal ini disebabkan kenaikan jumlah pengangguran lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja. Namun yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah sebagian besar penduduk yang bekerja berada pada sektor informal.

Tabel 5: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014 – 2019 (14)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fakfak	2,99	9,01	-	9,96	10,47	11,49
Kaimana	6,87	3,34	-	5,54	2,94	6,51
Teluk Wondama	0,98	2,83	-	1,47	3,29	3,23
Teluk Bintuni	8,25	6,87	-	7,62	6,01	8,29

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Manokwari	2,51	6,58	-	2,68	5,12	7,31
Sorong Selatan	1,82	2,87	-	4,84	4,89	3,82
Sorong	3,81	5,66	-	4,56	3,08	2,94
Raja Ampat	3,44	5,59	-	3,1	3,32	2,16
Tambrauw	1,17	-	-	0,44	3,07	2,13
Maybrat	-	4,01	-	1,55	1,65	0,50
Manokwari Selatan	-	4,18	-	1,61	5,14	2,48
Pegunungan Arfak	-	1,05	-	0,99	1,29	0,22
Kota Sorong	-	17,26	-	13,54	11,41	9,87

Hasil Estimasi dan Diskusi

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu wilayah. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah membelanjakan anggaran yang dimiliki untuk penyediaan fasilitas publik, bantuan sosial, dan program/kegiatan lainnya. Pembangunan ekonomi dalam penelitian ini didekati dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengeluaran pemerintah didekati

dengan belanja untuk urusan kesehatan dan pendidikan. Untuk melihat apakah belanja pemerintah efektif meningkatkan IPM maka digunakan tiga model. Model 1, melihat apakah belanja urusan kesehatan mampu meningkatkan IPM. Model 2, melihat apakah belanja urusan pendidikan mampu meningkatkan IPM. Model 3, melihat apakah belanja urusan kesehatan bersama dengan belanja urusan pendidikan mampu meningkatkan IPM.

Tabel 6: Hasil Estimasi dengan Variabel Dependent adalah Indeks Pembangunan Manusia

Variabel	Model 1	Model 2	Model 3
ln Belanja urusan Kesehatan per kapita	0,2519** (0,1112)		0,1844* (0,0982)
ln Belanja urusan Pendidikan per kapita		0,6132*** (0,1698)	0,5384*** (0,1812)
ln PDRB per kapita	7,1736*** (1,7050)	7,0543*** (1,5796)	6,5843*** (1,6044)
ln PAD per kapita	0,1124 (0,1302)	0,1875 (0,1534)	0,1512 (0,1429)
Persentase Penduduk Miskin	-0,3553*** (0,0479)	-0,3404*** (0,0505)	-0,3358*** (0,0494)
Constant	-8,2585 (17,9750)	-10,9046 (16,9386)	-8,1147 (17,0096)
Observations	78	78	78
R-squared	0,9955	0,9957	0,9959

Keterangan: nilai *robust standard errors* berada dalam kurung, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk urusan kesehatan dan pendidikan memberikan dampak bagi peningkatan IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat selama periode 2014-2019. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara (15), serta di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah (16). Jika belanja pemerintah urusan kesehatan per kapita naik sebesar satu persen maka rentang kenaikan nilai IPM sebesar 0,0018 – 0,0025 point. Sedangkan kenaikan satu persen urusan pendidikan akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0,0054 – 0,0061 point. Pada satu sisi, rata-rata kenaikan nilai IPM dalam periode yang sama yaitu sebesar 0,66 point per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi belanja pemerintah untuk bidang kesehatan terhadap peningkatan IPM sebesar 0,27 – 0,38 persen dan bidang pendidikan sebesar 0,82 – 0,92 persen. Pada sisi lainnya, rata-rata share total belanja untuk bidang pendidikan dan kesehatan sebesar 10,60 % dan 13,31% secara berturut-turut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran urusan kesehatan dan pendidikan belum efektif dalam meningkatkan IPM.

Variabel PDRB per kapita menunjukkan kontribusi yang positif bagi peningkatan IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Provinsi Aceh (17). Jika PDRB per kapita di Provinsi Papua Barat meningkat sebesar satu persen maka IPM akan meningkat sebesar 0,0658 – 0,0717 point. Artinya, PDRB

per kapita memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM sebesar 9,94 – 10,83 persen per tahun. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa kenaikan PDRB per kapita belum dinikmati secara merata oleh masyarakat di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kemandirian fiskal suatu daerah. Jika PAD suatu daerah semakin besar dan melebihi pendapatan transfer dari pemerintah pusat maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri secara fiskal. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel PAD per kapita tidak memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (18), namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan di Minahasa Tenggara (19). Data rata-rata share PAD terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat pada rentang waktu 2014-2019 sebesar 3,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat belum mandiri secara fiskal.

Variabel persentase penduduk miskin (P0) menunjukkan kontribusi yang negatif dan signifikan bagi IPM. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Batang Hari yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak memberikan dampak signifikan terhadap IPM (20). Setiap kenaikan satu persen persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat maka akan

menurunkan IPM sebesar 0,0034 – 0,0036 point. Jika dilihat dari profil kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yang cenderung masih berada jauh dari persentase penduduk miskin secara nasional, maka hal ini sejalan dengan nilai IPM yang masih rendah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah akan mampu meningkatkan nilai IPM jika program tersebut tepat sasaran.

SIMPULAN

Belanja pemerintah yang efektif dapat mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Papua Barat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, hal ini belum sejalan dengan share belanja terhadap kedua sektor ini.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja dari kedua sektor ini terutama untuk belanja modal. Fasilitas pendidikan pada daerah-daerah yang jauh dari kota perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah. Selain itu, fasilitas kesehatan yang menunjang pertolongan pertama perlu untuk diadakan berdasarkan pada tingkat kesulitan layanan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kuncoro M. *Ekonomika Pembangunan*,

Teori, Masalah, dan. Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN; 2006.

2. Todaro M., Smith S. *Pembangunan Ekonomi*, Jilid 1. Erlangga, Jakarta; 2009.
3. Mankiw N. *Macroeconomics* 8th edition. Worth Publishers/Palgrave Macmillan. Harvard University. United States of America; 2013.
4. Putra, P.G.M dan Ulupui IGK. *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. E-Jurnal Akunt Univ Udayana. 2015;11(3):863–77.
5. Ningrum JW, Khairunnisa AH, Huda N. *Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam*. J Ilm Ekon Islam. 2020;6(2):212–22.
6. BPS. *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021*. Badan Pusat Statistik. 2022.
7. BPS. *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021*. Badan Pusat Statistik. 2022.
8. DJPK. *Data Realisasi APBD Menurut Provinsi Tahun 2011-2020*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. 2022.
9. Wooldridge J. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, 5th edition. South-Western, Cengage Learning. USA; 2012.
10. BPS Provinsi Papua Barat. *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014 – 2019*. Badan Pusat Statistik Papua Barat. 2022.
11. BPS Provinsi Papua Barat. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014 – 2019*. Badan Pusat Statistik Papua

- Barat. 2022.
12. BPS Provinsi Papua Barat. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014 – 2019. Badan Pusat Statistik Papua Barat. 2022.
 13. BPS Provinsi Papua Barat. Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014 – 2019. Badan Pusat Statistik Papua Barat. 2022.
 14. BPS Provinsi Papua Barat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014 – 2019. Badan Pusat Statistik Papua Barat. 2022.
 15. Palayukan M. Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *J BPPK*. 2019;12(2):74–91.
 16. Handayani S, Woyanti N. Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran dan Belanja Modal terhadap IPM di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011-2019. *BISECE (bus Econ Entrep)*. 2021;4(2):17–26.
 17. Muliza, Zulham T, Seftarita C. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh. *J Perspekt Ekon Darussalam*. 2017;3(1):51–69.
 18. Joni F, Megi Laila P. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Ddn Pertumbuhanekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Menara Ekon*. 2022;8(1):18–29.
 19. Patadang T., Rotinsulu T., Rorong IP. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *J Pembang Ekon dan Keuang Drh*. 2021;22(2):132–49.
 20. Jasadila. Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011 -2019. *Eksis J Ilm Ekon dan Bisnis*. 2020;11(1):40–4.